

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Manajemen Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta dalam Mewujudkan Program Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025” yang dianalisis menggunakan teori manajemen komunikasi Michael Kaye, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, pada tahap perencanaan pesan (*message planning*), DP3AP2KB Kota Yogyakarta telah menjalankan perencanaan komunikasi secara sistematis dan strategis. Perencanaan pesan tidak disusun secara seragam, melainkan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta karakteristik audiens. DP3AP2KB berperan sebagai *leading sector* yang merumuskan narasi besar Program KLA dan menerjemahkannya ke dalam pesan-pesan spesifik bagi tiap aktor. Praktik ini menunjukkan kesesuaian dengan konsep Michael Kaye bahwa perencanaan komunikasi harus berbasis tujuan, pemetaan aktor, dan konteks lingkungan komunikasi.

Kedua, pada tahap pengorganisasian pesan (*message organizing*), DP3AP2KB telah mengorganisasikan pesan KLA ke dalam struktur komunikasi yang jelas melalui pembagian peran, klaster tanggung jawab, dan forum koordinasi.

Pesan KLA tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi dioperasionalkan melalui peran OPD, Forum Anak, KPAID, dan unit teknis seperti UPT PPA. Pengorganisasian ini mencerminkan prinsip Michael Kaye mengenai pentingnya struktur dan alur komunikasi agar pesan tersampaikan secara konsisten dan tidak tumpang tindih.

Ketiga, pada tahap pemilihan saluran komunikasi (*selecting communication channels*), DP3AP2KB Kota Yogyakarta telah menggunakan kombinasi saluran komunikasi luring dan daring secara kontekstual. Komunikasi tatap muka digunakan untuk pesan yang bersifat kompleks, persuasif, dan membutuhkan interaksi langsung, sementara komunikasi daring, media sosial, dan media massa dimanfaatkan untuk efisiensi, jangkauan luas, serta penyesuaian dengan karakteristik audiens, khususnya anak dan remaja. Pemilihan saluran ini sejalan dengan prinsip *channel appropriateness* dalam teori Michael Kaye, di mana saluran dipilih berdasarkan tujuan komunikasi dan karakter penerima pesan.

Keempat, pada tahap koordinasi (*coordination*), DP3AP2KB menjalankan fungsi koordinasi secara berlapis dan lintas sektor melalui Gugus Tugas Kota Layak Anak, koordinasi partisipatif dengan Forum Anak, koordinasi pengawasan dengan KPAID, serta koordinasi teknis penanganan kasus oleh UPT PPA. Koordinasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan operasional. Hal ini menunjukkan adanya upaya membangun *unity of action* sebagaimana ditekankan Michael Kaye dalam manajemen komunikasi organisasi yang kompleks.

Kelima, pada tahap evaluasi (evaluation), evaluasi komunikasi Program KLA dilakukan secara komprehensif melalui penilaian indikator resmi, pelaporan data, serta umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk anak sebagai subjek kebijakan. Evaluasi juga mencakup aspek keberlanjutan program, efektivitas komunikasi, dan capaian layanan perlindungan anak. Praktik ini sejalan dengan pandangan Michael Kaye bahwa evaluasi merupakan mekanisme pembelajaran organisasi (*organizational learning*) yang menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam manajemen komunikasi.

Secara keseluruhan, manajemen komunikasi DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Program Kota Layak Anak Tahun 2025 telah berjalan secara terstruktur dan selaras dengan tahapan manajemen komunikasi Michael Kaye. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan, terutama pada aspek keberlanjutan program, pemerataan implementasi, dan penguatan efektivitas komunikasi lintas sektor.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran yang bersifat akademik dan praktis sebagai berikut.

Pertama, bagi DP3AP2KB Kota Yogyakarta, disarankan untuk memperkuat aspek keberlanjutan komunikasi Program KLA, khususnya melalui monitoring dan pendampingan yang lebih konsisten terhadap inisiatif-inisiatif KLA di tingkat wilayah, sekolah, dan layanan teknis. Selain itu, perlu dilakukan penguatan

kampanye komunikasi yang lebih adaptif terhadap perubahan perilaku anak dan masyarakat, terutama di era digital.

Kedua, dalam aspek koordinasi lintas sektor, DP3AP2KB perlu mendorong peningkatan komitmen dan keterlibatan aktif OPD, khususnya pada level pengambil keputusan, agar koordinasi tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi mampu menghasilkan keputusan strategis yang cepat dan tepat. Penguatan sinkronisasi data antar-OPD juga perlu menjadi perhatian untuk mendukung efektivitas komunikasi dan evaluasi program.

Ketiga, dalam pelibatan anak, Forum Anak Kota Yogyakarta perlu terus diperkuat tidak hanya sebagai media aspirasi, tetapi juga sebagai mitra strategis komunikasi publik KLA. Perluasan jangkauan sosialisasi oleh Forum Anak dapat membantu meningkatkan kesadaran anak-anak lain yang belum terjangkau informasi mengenai KLA dan hak anak.

Keempat, bagi lembaga pengawas dan pendukung, seperti KPAID dan UPT PPA, disarankan untuk terus meningkatkan sinergi dengan DP3AP2KB dalam aspek evaluasi dan pendampingan berkelanjutan. Pendekatan evaluasi yang tidak hanya berbasis indikator, tetapi juga berbasis dampak sosial dan pemulihan korban, perlu terus dikembangkan.

Kelima, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya melalui metode kuantitatif atau mixed methods, guna mengukur secara lebih objektif efektivitas komunikasi Program KLA terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Penelitian

lanjutan juga dapat membandingkan praktik manajemen komunikasi KLA di Kota Yogyakarta dengan daerah lain untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif.